



SPPA Bina Remaja Terlibat Kriminalitas

YOGYA, TRIBUN - Maraknya kasus kriminal yang melibatkan remaja atau usia anak-anak, masih saja terjadi di Kota Yogyakarta. Tapi, selama ini, perhatian kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya selepas menyelesaikan masa hukuman pidananya, dianggap masih sangat kurang.

Hal tersebut, lantas menginisiasi Pemkot Yogyakarta untuk merealisasikan sebuah forum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bersama aparat penegak hukum. Beberapa di antaranya adalah, Polresta, Kejaksaan Negeri, Pengadilan

Negeri, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Kanwil Kemenkumham DIY.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Edy Muhammad mengatakan, forum tersebut jadi wadah koordinasi dan pengesahan hal-hal terkait mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

"Sejak proses awal, bila anak itu ada proses diversi, atau dilanjutkan ke persidangan, menjalani hukuman, hingga kembali ke lingkungannya," tandasnya,

di sela pengukuhan forum SPPA, kemarin.

Berdasarkan data dari LPKA Kelas I DIY, terdapat 27 anak di penjara DIY, yang berhadapan dengan hukum. Dari jumlah tersebut, lanjutnya, 15 di antaranya masih usia anak dan 50 persen, atau separuhnya berasal dari Kota Pelajar. Menurutnya, mereka terlibat dalam kasus yang tidak bisa diselesaikan secara diversi.

"Sehingga, mereka harus menjalani masa hukuman di LPKA. Mayoritas, karena masalah kejahatan jalanan. Selama

masa hukuman pun hak pendidikan, sosial dan pengembangan harus dipenuhi," urainya.

Sayangnya, lembaga dalam hal penanganan dan pendampingan hanya dilakukan pada korban semata, sementara para pelaku, atau anak yang berhadapan dengan dengan hukum belum cukup tersentuh. Sehingga, Pemkot Yogyakarta bakal merevisi payung hukumnya, untuk menjangkau pelaku, hingga saksi.

Melalui koordinasi yang tercipta lewat forum SPPA, eksekutif nantinya dapat

melaksanakan pengondisian lingkungan kala anak yang berhadapan dengan hukum akan kembali ke lingkungannya. Menurutnya, Pemkot Yogyakarta dengan segala atribut penunjang Kota Layak Anak, siap melakukan hal tersebut.

Lebih lanjut, Edy pun menyebut, aparat penegakan hukum di Kota Yogyakarta sejauh ini juga telah selaras dengan program Kota Layak Anak yang digaungkan eksekutif. Mulai dari Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan, hingga Kepolisian, yang mewujudkan deretan Polek Ramah Anak. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005